

Pengaruh Penganggaran dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Gorontalo

Estin Abdullah, Harun Blongkod, Hendra Pratama Danial

Universitas Negeri Gorontalo

estinabdullah01@gmail.com, blongkod@ung.ac.id, hendrapdanial@ung.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of budgeting and internal control on regional financial accountability at Regional Apparatus Organizations of Gorontalo City. This study employed a quantitative method with primary data obtained through questionnaire distributed to government officials at the Regional Apparatus Organizations of Gorontalo City. The sample consisted of 102 respondents, including Heads of Agencies, Secretaries, Treasurers, Finance Division staff, and Technical Activity Implementation Officers. The data are analyzed using descriptive analysis and Structural Equation Modeling (SEM) with AMOS 24, supported by SPSS 16. The findings are as follow: (1) budgeting has a positive and significant influence on regional financial accountability at the Regional Apparatus Organizations of Gorontalo City; (2) internal control has a positive and significant influence on regional financial accountability at the Regional Apparatus Organizations of Gorontalo City; and (3) budgeting and internal control have a positive and significant influence on regional financial accountability at the Regional Apparatus Organizations of Gorontalo City.

Keywords: *Budgeting, Internal Control, Regional Financial Accountability.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penganggaran dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada aparatur pemerintah di OPD Kota Gorontalo. Sampel penelitian terdiri dari 102 responden, yang mencakup kepala dinas/badan, sekretaris, bendahara, staf bagian keuangan, dan pejabat pelaksana kegiatan teknis. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan perangkat lunak AMOS 24, yang didukung oleh SPSS 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penganggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada OPD Kota Gorontalo; (2) pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada OPD Kota Gorontalo; dan (3) penganggaran dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada OPD Kota Gorontalo..

Kata Kunci Penganggaran, Pengendalian Internal, Akuntabilitas Keuangan Daerah.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas keuangan daerah merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana publik dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Alam et al., 2018 Akuntabilitas dikenal sebagai kewajiban dari individu atau organisasi internal dan eksternal untuk mempertanggungjawabkan kegiatan mereka, menerima tanggung jawab atas kegiatan tersebut dan mengungkapkan hasilnya secara transparan. Mardiasmo (2012) dalam Susliyanti & Binawati, (2020) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban yang penting atas segala aktivitas kegiatan dan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memberi amanah. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab, akuntabilitas keuangan daerah menjadi aspek yang sangat penting. Untuk bisa mengukur akuntabilitas keuangan daerah terdapat beberapa dimensi diantaranya akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas manajerial, dan akuntabilitas hukum.

Sebagai penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah diberi tanggungjawab berupa upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan, Akuntabilitas program adalah bagian dari akuntabilitas kinerja yang menekankan pada kegiatan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program pemerintah, termasuk pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan (Cahya Mareta, 2024). Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya mencakup pelaksanaan program, tetapi juga kebijakan yang mendasari pengambilan keputusan oleh pemerintah. Keterbukaan informasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar masyarakat juga paham terkait prosedur yang akan dijalankan tersebut (Nugraheni & Susiloadi, 2022).

Setiap program yang dijalankan pemerintah daerah dalam hal ini Adalah Organisasi Perangkat Daerah harus memenuhi persyaratan kebijakan regulasi yang ditetapkan. Menurut Ellwood (1993) dalam Ulya & Astuti, (2018) Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas, atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Pemendagri No.6 Tahun 2025 mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk mekanisme pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan daerah yang harus sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Komunikasi antara pemimpin dan bawahan juga penting sehingga terciptanya akuntabilitas manajerial dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah. Dimana menurut Ellwood dalam Mahmudi (2019:9-11) dalam Nugraheni & Susiloadi, (2022) Akuntabilitas manajerial merupakan lembaga publik harus bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien. Di samping aspek manajerial yang menekankan efisiensi internal, akuntabilitas keuangan daerah juga mencakup dimensi etis dan legal untuk menjamin integritas secara keseluruhan dalam penggunaan sumber daya publik. menekankan pada dua aspek yaitu kejujuran dan hukum. Pada aspek kejujuran mengacu pada sikap organisasi yang berperilaku

jujur saat bekerja dan tidak melakukan penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Sebagaimana menurut Umam & Rusli, (2021) Aspek hukum terkait ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari beberapa dimensi Akuntabilitas keuangan di Indonesia, fenomena lemahnya akuntabilitas keuangan daerah tetap menjadi perbincangan hangat karena dalam penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Dimana pengelolaan dana publik sering kali terganggu oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merugikan negara hingga triliunan rupiah setiap tahunnya. Sebagaimana dalam ujaran Wakil ketua KPK di kutip dari (Sumber: KPK <https://share.google/GAMLJP5CrnsjRoG3F>) dari segi kuantitas, terdapat konsistensi dalam jumlah penanganan perkara pada periode 2020-2024. Selama 5 tahun, KPK mencatat telah melakukan penyelidikan (541 perkara), penyidikan (622 perkara), penuntutan (510 perkara), perkara yang berkekuatan hukum tetap/inkracht (533 perkara;) dan pelaksanaan eksekusi (524 perkara).

Fenomena lemahnya akuntabilitas keuangan daerah di Indonesia, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, semakin terlihat nyata melalui berbagai kasus korupsi yang melibatkan pengelolaan anggaran publik di tingkat daerah. Salah satu contoh konkret adalah kasus korupsi proyek Kanal Tanggidaa di Kota Gorontalo, yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo. Berdasarkan berita resmi dari situs Kejati Gorontalo (kejati-gorontalo.go.id) Kejaksaan Tinggi Gorontalo telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara korupsi pembangunan Kanal Tanggidaa di Kota Gorontalo (tahun anggaran 2022). Mereka dituduh melakukan manipulasi terhadap progres fisik pekerjaan sehingga terjadi kekurangan volume, yang menyebabkan kerugian negara. Pihak Kejaksaan menilai ada penyelewengan anggaran yang termasuk anggaran belanja modal karena harga dan volume pekerjaan diduga tidak sesuai kontrak.

Rasionalitas dalam anggaran pemerintahan diperlukan untuk perbaikan komponen-komponen perencanaan anggaran. Musyarofah & Indarti, (2024) Perencanaan anggaran merupakan bagian penting dalam proses penyusunan anggaran, yaitu penyusunan anggaran harus dilandaskan atas dasar kebutuhan suatu daerah. Delia et al., (2021) Dengan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dapat memaksimalkan penyerapan anggaran secara optimal. Namun, dalam sidang lebih lanjut kasus kanal tanggidaa di kutip dari (gorontalo.bpk.go.id) justru terdapat masalah dalam harga aramco yang dianggarkan. Pihak Terdakwa dan Kuasa Hukumnya berargumen bahwa terdapat selisih harga aramco (Rp 44 juta vs Rp 35,5 juta per ton). Artinya, pihak terdakwa menyangkal bahwa hasil perhitungan kerugian tidak sesuai dengan standar satuan harga. Munculnya selisih harga aramco antara harga kontrak dan harga pabrikan menunjukkan bahwa penganggaran bisa menjadi fokus karena selisih tersebut. Sesuai dengan (Perwako No 3, 2023), yang mengatur bahwa standar satuan harga bisa mengikuti perkembangan perekonomian harga pasar pada tahun tertentu. Undang-undang dan peraturan daerah mengharuskan anggaran itu direncanakan berdasarkan standar harga yang ditetapkan agar tidak terjadi manipulasi atau overpricing.

Berikut data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal Daerah Kota Gorontalo 2020-2024:

Tabel 1. 1 Realisasi Belanja Modal 2020-2024

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
2020	Belanja Modal	93.210.544.446	70.972.297.124	76%
2021	Belanja Modal	304.181.738.359	108.777.234.179	35,76%
2022	Belanja Modal	332.848.400.896	49.230.776.195	14,79%
2023	Belanja Modal	154.529.253.525	129.441.174,411	83,76%
2024	Belanja Modal	107.557.074.268	89.045.050.173	82,77%

Sumber: Badan Keuangan Kota Gorontalo

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Modal Daerah Kota Gorontalo tahun 2020–2024, terlihat adanya fluktuasi signifikan dalam persentase realisasi belanja terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, tingkat realisasi masih tergolong cukup tinggi yaitu sebesar 76%. Namun, terjadi penurunan tajam pada 2022 yang hanya mencapai 14,79%. Penurunan ini menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran yang menandakan bahwa anggaran pembangunan fisik belum dikelola oleh pengguna anggaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan Walikota tentang realisasi anggaran yang rendah disebabkan oleh target penyesuaian anggaran harus sesuai dengan yang disusun sejak awal (*Kominfo Kota Gorontalo*, 2022). Oleh karena itu, terlihat yang menjadi pondasi dalam kasus ini adalah perencanaan anggaran yang kurang matang. Sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah penganggaran merupakan tahap awal dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang menentukan alokasi dana secara rasional, realistis, dan berorientasi pada prioritas Pembangunan.

Jika dalam kasus tersebut penetapan harga kontrak jauh melebihi harga pabrikan, maka pelaksanaannya merujuk dengan prinsip taat azas, yaitu harus sesuai aturan dan standar yang berlaku. Sekaligus menunjukkan harus dilakukan perbaikan terhadap disiplin anggaran dalam menetapkan anggaran. Dalam perbaikannya, disiplin anggaran perlu diimbangi dengan partisipasi masyarakat yang aktif agar proses penganggaran tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga mencerminkan transparansi. Hamzah et al., (2024) Partisipasi masyarakat yang aktif dalam pengelolaan anggaran, baik melalui forum diskusi, konsultasi publik, maupun pelatihan literasi, dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini menjadi penting bagi Organisasi Perangkat Daerah Kota Gorontalo sebagai pelaksana kebijakan anggaran untuk memastikan setiap proses penganggaran dilakukan secara disiplin. Oleh karena itu, diperlukan penganggaran yang memegang prinsip yang tepat agar penggunaan dana publik dapat berjalan efektif serta selaras dengan tujuan program yang telah dirancang.

Juwita, (2017) Konflik yang terjadi dalam penentuan anggaran sangat berpengaruh terhadap kapabilitas eksekutif organisasi untuk mengendalikan pengeluaran. Jika pengendalian internal berjalan efektif, maka ketidaksesuaian harga

dan volume pekerjaan seharusnya terdeteksi sejak awal, bukan setelah proyek selesai mencapai 80% dan diperiksa oleh BPK atau Kejaksaan. Aprillia & Usman, 2023 menemukan bahwa pengawasan atas kualitas pengendalian intern (kapabilitas APIP, maturitas SPIP) berpengaruh positif signifikan pada tata kelola pemerintah daerah. Namun hal ini berbanding terbalik pada fenomena yang terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo yang memperlihatkan adanya temuan BPK terkait ketidaksesuaian dalam realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2024 yang dinilai tidak sesuai ketentuan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Temuan ini bahkan menimbulkan adanya indikasi kekurangan volume dan pertanggungjawaban belanja yang tidak sepenuhnya didukung bukti memadai, sehingga menuntut adanya klarifikasi dari Kepala Dinas Dukcapil Kota Gorontalo (*WakilRakyat.Co*, 2024). SPIP yang baik secara signifikan menurunkan kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan aset daerah di banyak OPD. Mardi (2011) dalam Pratiwi et al., (2021) menyatakan pengendalian internal merupakan suatu prosedur yang meliputi struktur organisasi serta semua proses dan ukuran-ukuran yang berguna untuk menjaga aset dalam suatu organisasi dalam hal ini adalah Organisasi Perangkat Daerah. Dengan demikian, efektivitas pengendalian intern menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya penyimpangan anggaran. Menurut Shidqi & Arfiansyah, 2025 bahwa *internal controls* dan fungsi audit internal yang matang secara signifikan mengurangi korupsi di pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPIP Adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien terhadap peraturan perundang-undangan.

Nurasfitri & Yusuf, (2022) Melalui terciptanya tata kelola yang baik, mengindikasikan kinerja baik dari manajemen sehingga dapat menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan lembaga. Dengan adanya pengendalian, tentu dapat mengawasi setiap kegiatan operasional pemerintah sehingga dapat meminimalisir adanya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan yang terjadi dalam suatu Organisasi. Hadi Jauhari dan Misfi El Auda, (2021) Sistem pengendalian intern merupakan suatu aturan yang dibuat oleh suatu organisasi dalam menjalankan roda kegiatan yang terdapat diorganisasi tersebut yang sejalan dengan peraturan yang berlaku. Hafsah & Loka, (2021) Penerapan sistem pengendalian internal secara baik dan benar pada suatu pemerintahan juga dapat mempermudah meminimalkan risiko. Namun, penyimpangan dari pernyataan ini sering terjadi ketika implementasi pengendalian internal lemah atau tidak benar, yang justru menghambat pencapaian tujuan pemerintahan dan memperbesar risiko kerugian negara, sebagaimana terilustrasi dalam kasus korupsi proyek Kanal Tanggida di Kota Gorontalo dan temuan BPK pada Dinas Dukcapil terkait ketidaksesuaian dalam realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2024. Untuk itu, agar dapat mengukur pengendalian intern telah berjalan dengan baik dalam suatu organisasi, diperlukan penerapan beberapa dimensi

diantaranya, terciptanya Integritas lingkungan pengendalian yang optimal, Penilaian resiko dan kegiatan pengendalian yang efektif.

Berdasarkan fenomena di atas, memperlihatkan adanya faktor penting dalam penganggaran dan pengendalian intern untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Gorontalo. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Musyarofah & Indarti, 2024) perencanaan anggaran dan pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Juga hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rakhma & Sulistyowati, 2021) menunjukkan bahwa Determinan Penganggaran, Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kota Surabaya. Serta hasil penelitian Fitriani et al., (2025) pengendalian internal tidak berpengaruh pada akuntabilitas keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara, Demak, dan Pati.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa penganggaran dan pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, namun hasil temuan tersebut belum sepenuhnya konsisten di berbagai konteks pemerintahan daerah khususnya Organisasi Perangkat Daerah. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan keuangan di tingkat instansi tertentu, seperti UPT dan Badan. Sehingga belum banyak mengkaji penerapan kedua variabel tersebut pada pemerintah daerah dengan kompleksitas Organisasi Perangkat Daerah. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menguji kembali Pengaruh Penganggaran dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Gorontalo sebagai upaya memberikan bukti empiris baru terkait praktik tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sugiyono, (2022:15) Metode penelitian kuantitatif adalah data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kuantitatif memungkinkan peneliti untuk mengukur penganggaran dan menilai pengendalian intern dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan Daerah Kota Gorontalo pada Organisasi Perangkat Daerah, serta menganalisis hubungan statistik antara variabel-variabel tersebut.

Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain kausal, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Desain ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengidentifikasi korelasi antar variabel, tetapi juga menjelaskan bagaimana dan mengapa variabel-variabel tersebut saling memengaruhi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan temuan penelitian ini menggunakan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi responden di lapangan. Selain itu,

studi ini juga memperhitungkan perbandingan dengan teori dan artikel ilmiah yang relevan dengan variabel penelitian.

Pengaruh penganggaran terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada organisasi perangkat daerah kota gorontalo

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penganggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini memberikan arti bahwa dimensi penganggaran mempunyai dampak signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Gorontalo. Hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Hal ini juga sesuai dengan data empiris, nilai mean pada variabel penganggaran menunjukkan beberapa indikator dengan nilai mean tinggi, yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan Akuntabilitas keuangan daerah.

Seperti Indikator X1.3, *“Dokumen anggaran OPD kami memuat justifikasi dengan cara menghindari pemborosan harga pada spesifikasi yang tidak perlu”* yang memiliki nilai mean 4,38. Nilai tersebut menunjukkan responden cenderung setuju bahwa penyusunan dokumen anggaran telah dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan penghindaran pemborosan. Hal ini mengindikasikan penerapan prinsip tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan daerah, karena anggaran yang disusun secara rasional dan berbasis kebutuhan akan mempermudah dalam proses pelaporan serta pertanggungjawaban kepada publik.

Selanjutnya indikator X1.5 juga menunjukkan nilai mean 4,37 yaitu *“Proses perencanaan anggaran OPD kami mengharuskan adanya korelasi yang jelas antara alokasi belanja dengan sasaran peningkatan kinerja pelayanan publik”*. Hal ini menunjukkan bahwa penganggaran tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada hasil yang ingin dicapai. Ini mengindikasikan bahwa setiap penggunaan anggaran di OPD dapat diukur keberhasilannya berdasarkan output dan outcome yang dihasilkan. Nurfathia Dumbi, Hartati Tuli, Mulyani Mahmud, Hendra Pratama Danial (2025) Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Temuan ini semakin menegaskan bahwa kualitas penganggaran yang baik, khususnya yang berbasis kinerja, memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Gorontalo.

Dengan demikian, dalam konteks pemerintah daerah, keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyusunan anggaran serta kejelasan alokasi sumber daya akan meminimalkan potensi penyimpangan dan perilaku oportunistik yang dapat merugikan kepentingan publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Musyarofah & Indarti, 2024) dan (Rakhma & Sulistyowati, 2021) yang mengindikasikan adanya pengaruh yang signifikan dari penganggaran terhadap akuntabilitas keuangan. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh (Regita Padmadiani, Harun Blongkod, 2023) kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo.

Namun, penelitian (Nadira s Sidik, Niswatin, Nilawaty yusuf 2022) turut mendukung temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa penganggaran yang disusun secara partisipatif dan terarah mampu mendorong efektivitas pengelolaan organisasi karena adanya keterlibatan berbagai pihak dalam menentukan program dan kebutuhan anggaran. Temuan tersebut relevan dengan kondisi pada OPD Kota Gorontalo, dimana alokasi anggaran telah disusun dengan memperhatikan efisiensi dan ketercapaian sasaran pelayanan publik sehingga mendukung terciptanya pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik. Namun demikian, penelitian tersebut menemukan bahwa partisipasi anggaran hanya berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja manajerial karena keterlibatan pegawai belum sepenuhnya mencapai tahap penentuan anggaran. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penganggaran dalam meningkatkan akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh kualitas implementasi penganggaran pada masing-masing organisasi.

Secara teoritis, hasil penelitian sejalan dengan teori keagenan (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling, n.d yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (masyarakat/publik) dan agen (pemerintah daerah/OPD). Dalam hubungan tersebut, pemerintah daerah diberi mandat untuk mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab. Penganggaran yang disusun secara transparan, partisipatif, serta memiliki kejelasan dalam alokasi sumber daya dan keterkaitannya dengan kinerja, berperan sebagai instrumen pengendalian untuk mengurangi konflik keagenan. Jadi, Melalui penganggaran yang baik, informasi mengenai penggunaan anggaran menjadi lebih terbuka dan terstruktur, sehingga masyarakat sebagai prinsipal dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin baik kualitas penganggaran yang diterapkan, maka semakin kecil potensi terjadinya perilaku oportunistik dari pihak agen, dan pada akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini memperkuat bahwa penganggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai mekanisme tata kelola yang mampu menjembatani kepentingan antara pemerintah dan masyarakat dalam kerangka teori agensi.

Pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan daaerah pada organisasi perangkat daerah kota gorontalo

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pengendalian intern memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh organisasi perangkat daerah, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas keuangan daerah. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima. Pengendalian intern yang efektif mampu memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, sesuai dengan peraturan, serta terhindar dari kesalahan maupun kecurangan. Hal ini juga sesuai dengan data empiris, nilai mean pada variabel pengendalian intern menunjukan beberapa indikator dengan nilai mean tinggi, yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan Akuntabilitas keuangan daerah.

Berdasarkan data empiris di lapangan, nilai mean pada variable pengendalian intern menunjukkan beberapa indikator dengan nilai mean tinggi, yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan daerah pada organisasi perangkat daerah kota Gorontalo. Indikator X2.1, *“Pimpinan di unit kerja saya selalu memberikan contoh yang baik dalam hal kejujuran dan disiplin kerja”* memiliki nilai mean 4,38. Nilai tersebut menunjukkan bahwa responden cenderung setuju bahwa pimpinan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Gorontalo telah menciptakan lingkungan pengendalian yang baik melalui keteladanan dalam kejujuran dan disiplin kerja.

Selain itu, indikator X2.11, *“Pemeriksaan fisik atas aset dilakukan secara berkala untuk mencegah kehilangan dan penyalahgunaan”* yang memiliki nilai mean 4,27. Nilai ini menunjukkan bahwa responden cenderung setuju bahwa pemeriksaan fisik atas aset telah dilakukan secara rutin dan terjadwal pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Gorontalo. Hal ini mencerminkan adanya aktivitas pengendalian yang kuat, khususnya dalam upaya menjaga keamanan dan keberadaan aset daerah dari risiko kehilangan maupun penyalahgunaan. Selanjutnya, Indikator X2.14 *“Sistem aplikasi keuangan di unit kerja saya selalu diperbarui (di-update) secara rutin untuk mengikuti perkembangan aturan”* memiliki nilai mean 4,35. Pembaruan sistem aplikasi keuangan secara rutin juga mencerminkan bahwa aspek informasi dan komunikasi dalam pengendalian intern telah berjalan dengan baik. Sistem yang selalu diperbarui memungkinkan penyajian data keuangan menjadi lebih akurat, tepat waktu, dan relevan, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif. Sesuai dengan hasil penelitian (Sri Devianti Ibrahim, Hartati Tuli, Mulyani Mahmud 2024) penerapan sistem pengendalian intern juga memberikan dampak positif kepada staf pegawai penyusun laporan keuangan karena memudahkan pekerjaan yang dilakukan terlebih dalam proses penyusunan laporan keuangan

Dengan melihat hasil analisis deskriptif, temuan menunjukkan bahwa pengendalian intern tidak hanya diterapkan secara administratif, tetapi juga didukung oleh budaya organisasi, prosedur pengawasan yang jelas, serta sistem informasi yang memadai. Penerapan yang menyeluruh ini mampu meminimalkan risiko kesalahan dan kecurangan, serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, semakin efektif sistem pengendalian intern yang diterapkan, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas keuangan daerah yang dihasilkan. Hasil Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mansyuer & Efendi David, 2020) dan penelitian (, Hadi Jauhari dan Misfi El Auda, 2021) bahwa pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fitriani et al., 2025) yang menunjukkan pengendalian intern secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

Secara teoritis, hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Keagenan, Dimana pengendalian intern merupakan salah satu mekanisme penting dalam mengurangi konflik antara pihak agen (pemerintah daerah) dan prinsipal (masyarakat). Dalam

hubungan tersebut, potensi asimetri informasi dan perilaku oportunistik dapat diminimalkan melalui sistem pengendalian yang baik, seperti adanya pengawasan, prosedur yang jelas, serta sistem informasi yang andal. Artinya, pengendalian intern berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan kepentingan publik. Melalui penerapan pengendalian intern yang efektif, pemerintah daerah sebagai agen dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai prinsipal, karena setiap aktivitas pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akurat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini semakin memperkuat bahwa pengendalian intern memiliki peran strategis dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Gorontalo.

Pengaruh penganggaran dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada organisasi perangkat daerah kota

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa variabel penganggaran (X_1) dan pengendalian intern (X_2) secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai R-square sebesar 0,746 atau 74,6% yang berarti kombinasi kedua variabel ini mampu menjelaskan 74,6% variasi dalam akuntabilitas keuangan daerah. Namun, 25,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini, seperti kualitas sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, komitmen organisasi, serta faktor kepemimpinan dan budaya kerja yang belum dimasukkan dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penganggaran dan pengendalian intern memiliki kontribusi yang besar, masih terdapat variabel lain yang juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.

Secara simultan, kedua variabel tersebut saling melengkapi dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik. Penganggaran berfungsi sebagai dasar perencanaan yang menentukan arah dan prioritas penggunaan anggaran, sedangkan pengendalian intern berperan dalam memastikan bahwa pelaksanaan anggaran tersebut berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, serta prinsip akuntabilitas. Kombinasi keduanya menciptakan sinergi yang kuat dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika penganggaran disusun secara tepat dan pengendalian intern diterapkan secara efektif, maka akuntabilitas keuangan daerah akan meningkat secara signifikan. Hal ini karena setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dapat dikendalikan dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Temuan ini juga sejalan dengan konsep dalam teori agensi (*agency theory*), dimana penganggaran dan pengendalian intern berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk mengurangi potensi konflik antara agen (pemerintah daerah) dan prinsipal (masyarakat). Dengan adanya perencanaan anggaran yang jelas dan sistem pengendalian yang kuat, maka potensi penyimpangan

dapat diminimalkan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penganggaran dan pengendalian intern secara bersama-sama memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Gorontalo, sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Renyut, 2024) dan (Rakhma & Sulistyowati, 2021) yang mengindikasikan adanya pengaruh penganggaran dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas penganggaran dan memperkuat sistem pengendalian intern secara berkelanjutan. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan komitmen pimpinan dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas. Dengan demikian, akuntabilitas keuangan daerah dapat terus ditingkatkan secara optimal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta landasan teori yang telah dikemukakan, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penganggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Penganggaran yang disusun secara partisipatif, disiplin, efisien, dan taat asas mampu meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Gorontalo. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang baik menjadi dasar utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

2. Pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Sistem pengendalian intern yang efektif, yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, serta pemantauan, mampu mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan keandalan laporan keuangan. Dengan demikian, pengendalian intern menjadi faktor penting dalam mendukung akuntabilitas keuangan daerah.

3. Penganggaran dan pengendalian intern secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Kombinasi antara penganggaran yang baik dan pengendalian intern yang efektif memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah pada OPD Kota Gorontalo. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut saling melengkapi dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*).

DAFTAR PUSTAKA

Alam, M., Said, J., Azizal, M., & Aziz, A. (2018). *Role of integrity system, internal control*

- system and leadership practices on the accountability practices in the public sectors of Malaysia.* <https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2017-0051>
- Aprillia, Y., & Usman, F. (2023). *PENGENDALIAN INTERN TERHADAP TATA KELOLA.* 3(4), 408–425.
- Baviga, R. (2022). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Skpd Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kerinci. *Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management*, 2(2), 211–235. <https://doi.org/10.53363/buss.v2i2.49>
- Cahya Mareta, F. (2024). *Volume 6 Nomor 2 Edisi Maret 2024 MEKANISME AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK.* 6, 231–240.
- Delia, T., Syahril Djaddang, Suratno, & JMV. Mulyadi. (2021). Analisis Determinasi Penyerapan Anggaran Dengan Perencanaan Anggaran dan Politik Anggaran Sebagai Pemoderasi. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 116–131. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i1.77>
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. In *Pascasarjana Universitas Bosowa* (Vol. 5, Issue 3). [https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/773/12.BUKU_AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGLOLAAN KEUANGAN....pdf?sequence=1](https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/773/12.BUKU_AKUNTABILITAS_DAN_TRANSPARANSI_PENGLOLAAN_KEUANGAN....pdf?sequence=1)
- Fahisa, M., & Afriyenti, M. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa: Studi Empiris pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(2), 745–757. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.694>
- Fitriani, R. N., Baihaqi, J., & Kudus, I. (2025). Aksesibilitas Laporan Keuangan, Transparansi, Pengendalian Internal, dan Kompetensi Amil terhadap Akuntabilitas Keuangan Baznas. *Juni 2025index JEBISKU*, 3(2), 2987–3673. <http://jim.ac.id/index.php/JEBISKU/>
- Ghozali. (2016a). *Model persamaan struktural konsep dan aplikasi dengan program Amos 24 update bayesian SEM.*
- Ghozali, I. (2016b). *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi Dengan Program AMOS 24.* Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi Jauhari dan Misfi El Auda, E. D. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 5(2), 44–53.
- Hafsah, & Loka, R. F. (2021). Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 4(1), 24–37. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v4i1.6724>
- Hamzah, M., Surahman, F., Abdurahman, A., Saputri, E., & Basyarahil, A. (2024). Transparansi Anggaran Publik Sebagai Kunci Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Daerah. *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business*, 5(2), 199. <https://doi.org/10.28944/assyarikah.v5i2.1891>

- Hariyono, S. (2016). Metode SEM Untuk Penelitian Manajemen AMOS LiSREL PLS. In *PT IPU*.
- Harun blongkod. (2021). *Pengelolaan keuangan daerah dan Sistem Pengendalian Intern*.
- Haryanto dkk. (2017). Akutansi Sektor Publik. *Perpustakaan Nasional*, 3–251.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (n.d.). *Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure*.
- Juwita, R. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 615–622. <https://doi.org/10.22219/jrak.v4i2.4946>
- Kejati Gorontalo Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Kanal Tanggidaa. (n.d.). <https://kejati-gorontalo.go.id/berita/kejati-gorontalo-tetapkan-3-tersangka-korupsi-kanal-tanggidaa/>
- Kinerja KPK 2020-2024. (n.d.). sumber: KPK <https://share.google/GAMLJP5CrnsjRoG3F>
- Kominfo Kota Gorontalo. (2022). <https://share.google/VeREkuKQRqgnbhAct>
- Mahsun, M., Firma Sulistiyowati, A., & Heribertus Andre Purwanugraha, Q. (2011). Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik EDISI KETIGA. In *Jl. Gambiran No* (Vol. 37, Issue 0274).
- Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Mansyuer, T., & Efendi David. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–18.
- Musyarofah, M., & Indarti, M. G. K. (2024). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Realisasi Anggaran sebagai Variabel Pemediasi. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 14(1), 219–239. <https://doi.org/10.30588/jmp.v14i1.2143>
- Nadira s Sidik, Niswatin, N. Y. (2022). The Effect of Budget Participation on Managerial Performance with Organizational Commitment and Organizational Culture as Moderating Variables (Empirical Studies at the Economics Faculty, Gorontalo State University). *Management and Economic Journal*, 6(3), 219–236.
- Nasution, D. P. E. (2020). *Pengaruh Realisasi Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Efisiensi Anggaran Terhadap Akuntabilitas pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Surabaya*. 1–20.
- Nugraheni, R. A., & Susiloadi, P. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2020-2021 di Surakarta. *Wacana Publik*, 2(2), 432. <https://doi.org/10.20961/wp.v2i2.66591>
- Nurasfitri, W. A., & Yusuf, N. (2022). *Pengaruh Kompetensi Aparatur , Komitmen Organisasi , Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kualitas Sistem Informasi*

Akuntansi Manajemen Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kabila Bone, 5(2), 721–736.

Nurfathia Dumbi, Hartati Tuli, Muliyani Mahmud, H. P. D. (2025). *Jambura Accounting Review*. 6(1), 271–285.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. (2008). *Technological Forecasting and Social Change*, 60, 69–73. <http://210.76.211.142:80/rwt/ELSEVIER/https/MSYXTLUQPJUB/10.1016/j.techfore.2018.06.007%0Ahttps://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-33645547325%7B%7DpartnerID=40%7B%7Dmd5=5c937a0c35f8be4ce16cb392381256da>

Peraturan Walikota No 4 Tahun 2022 (Pasal 67-106). (2022).

Perwako No 3. (2023). *Perwako no 3*.

Perwakot Nomor 11 Tahun 2024. (2024).

Pratiwi, A. I., Isharijadi, I., & Styaningrum, F. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Persediaan Barang Dagang. *Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 11(2), 302–313. <https://doi.org/10.37932/j.e.v11i2.397>

Rakhma, S. Y., & Sulistyowati, E. (2021). Determinan Penganggaran, Sistem Pengendalian Internal, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(8), 1–22.

Regita Padmadiani¹, Harun Blongkod², A. R. W. (2023). *The influence of clarity of budget targets and internal control on the performance accountability of government institutions (study in regional apparatus organizations in gorontalo district)*. 7(1), 240–251.

Renyut, L. J. (2024). *Papsel economic journal*. 32–44.

Sabriani, A. A., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2019). *JURNAL AKUNTANSI & EKONOMI FE. UN PGRI Kediri*, 5(2), 14–23. www.bpkp.go.id

Sarwenda. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Vol. 17).

Shidqi, F., & Arfiansyah, Z. (2025). *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Good governance and corruption in local governments : The role of internal control and audit*. 29(1), 1–11.

Soraida, S. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Sebelum Dan Selama Pandemi. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 78–82.

Sri Devianti Ibrahim, Hartati Tuli, M. M. (2024). *Analisis Sistem Pengendalian Intern dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Sri Devianti Ibrahim*. 2(4), 412–423.

Sudjana, N. (2014). *Metode Penelitian*. Rineka, Cipta.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*.

Sunyoto, D. (2009). *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Penerbit MedPress.

Susliyanti, E. D., & Binawati, E. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Dan

Akuntabilitas Kinerja Terhadap Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Atas Penggunaan Dana Desa. *EFEKTIF Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 11(1), 1–12.

Ulya, C., & Astuti, E. B. (2018). Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim 63. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 63–79.

Umam, U., & Rusli, Z. (2021). Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 202–213. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(2\).7747](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(2).7747)

Vicry Raihan Tarima, J. M. (2022). Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi , dan Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Anggaran pada Pemerintah Kota Samarinda. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19(3), 682–693. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL/article/download/11781/2364>

WakilRakyat.co. (2024). [https://wakilrakyat.co/temuan-bpk-realisasi-belanja-barang-dan-jasa-dukcapi-kota-gorontalo-yusrianto-bilang-begini/#:~:text=Menyikapi temuan BPK tersebut%2C kepada wakilrakyat.co](https://wakilrakyat.co/temuan-bpk-realisasi-belanja-barang-dan-jasa-dukcapi-kota-gorontalo-yusrianto-bilang-begini/#:~:text=Menyikapi%20temuan%20BPK%20tersebut%20kepada%20wakilrakyat.co) Kadis, kerugian negara atau tuntutan ganti rugi (TGR)